

SINOPSIS

Pelaksanaan asas Desentralisasi dilakukan dalam segala bidang tak terkecuali bidang kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya memang masih banyak menemui kendala. Di Kabupaten Kulon Progo pelaksanaan Desentralisasi kesehatan juga masih menemui beberapa kendala seperti kurang siapnya SDM Dinas Kesehatan, permasalahan anggaran sampai permasalahan belum adanya Perda tentang tarif berobat di Puskesmas yang sesuai bila dilaksanakan dalam Desentralisasi. Untuk ini dibutuhkan peran yang maksimal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Peran ini mengacu pada SK Bupati Kulon Progo No 856 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Kesehatan. Oleh karena itu penyusun bermaksud mengetahui bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan tahun 2005-2006.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrument yaitu : wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan membuat gambaran tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Analisa data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh.

Peran Dinas Kesehatan kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan Desentralisasi kesehatan mencakup 3 peran yaitu : peran pengaturan, peran pemberdayaan dan peran pelayanan. Dalam peran pengaturan, Dinas kesehatan berperan dalam revisi atas Perda No 7 Tahun 1997 tentang tarif pelayanan pada puskesmas. Dimana dalam revisi ini akan adanya kenaikan tarif berobat dipuskesmas dan perbedaan tarif berobat bagi masyarakat luar Kabupaten Kulon Progo yang berobat di puskesmas Kabupaten Kulon Progo. Sampai penyusun melakukan penelitian revisi ini masih berjalan. Dalam peran pemberdayaan, Dinas Kesehatan berusaha memberdayakan SDM nya melalui program peningkatan pendidikan formal melalui tugas belajar dan ijin belajar serta melakukan pelatihan pelatihan. Namun diakui program ini masih belum maksimal untuk peningkatan SDM dalam hal pelayanan kepada masyarakat meskipun beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan peserta khususnya pegawai medis. Sedangkan dalam peran pelayanan, dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta peningkatan kesehatan masyarakat melalui Derajat Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari pemberantasan penyakit malaria, perbaikan gizi serta penekanan AKI/AKB.

Peran Dinas kesehatan Kabupeten Kulon Progo dalam pelaksanaan Desentralisasi kesehatan dalam peran pengaturan, Dinas Kesehatan sedang melakukan revisi atas Perda tarif pelayanan. Dalam peran pemberdayaan, peserta program tugas belajar dan ijin belajar setiap tahunnya meningkat meskipun belum maksimal untuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk fasilitas pelayanan, peralatan kesehatan secara kuantitas telah mencukupi untuk pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat, namun secara kualitas ada beberapa peralatan yang perlu segera diganti. Sedangkan dalam program peningkatan derajat kesehatan, pemberantasan penyakit malaria dapat dikatakan berhasil dengan tidak diketemukan kematian akibat malaria, untuk angka kematian ibu dan bayi menurun dan untuk status gizi buruk balita menurun. Di harapkan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan terus meningkatkan perannya sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal.